

**PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA OTONOMI
KHUSUS TERDAHAP PENGURANGAN KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH, PAPUA DAN PAPUA BARAT
TAHUN 2010-2020**



Skripsi Oleh

NUR ANISA

01021181823038

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA OTONOMI KHUSUS
TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI ACEH, PAPUA DAN
PAPUA BARAT TAHUN 2010-2020

Disusun oleh:

Nama : Nur Anisa
NIM : 01021181823038
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PESETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal: 24 Desember 2022

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH, PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2010-2020

Disusun Oleh:

Nama : Nur Anisa
NIM : 01021181823038
Fakultas : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 3 Januari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk di terima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 3 Januari 2023

Ketua



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Anggota

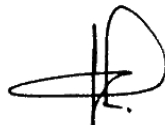


Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 15-3-2023
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Anisa
NIM : 01021181823038
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2020

Pembimbing : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 3 Januari 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia mencabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 27 Februari 2023
Pembuat Pernyataan,



Nur Anisa
NIM. 01021181823038

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2010-2020” sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi, berkat dukungan, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun demi kepentingan skripsi ini.

Palembang, 3 Januari 2023



Nur Anisa
01021181823038

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suyatmin dan Ibunda Sumarwati yang senantiasa memberikan doa, semangat dan motivasi penuh dalam bentuk apapun, yang telah bersusah payah bekerja demi kelancaran pendidikan penulis.
3. Saudara kandungku tersayang, Safitri Indriani, Rio Rahmadan dan Meliani, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Feny Marissa, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis serta telah membantu dalam memberikan saran, kritik dan masukan terhadap skripsi ini.

6. Dr. M. Subardin, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangat untuk saya ketika bimbingan akademik selama menjalani perkuliahan.
7. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah mmeberikan arahan, dukungan dan motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Para dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah bersedia memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.
9. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Kampus Indralaya khususnya Naura, Dian, Neki, Dinda dan semua pihak yang pernah hadir dalam hidup penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 27 Februari 2023

Penulis,



Nur Anisa

01021181823038

ABSTRAK

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH, PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2010-2020

Oleh:

Nur Anisa; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari data *cross section* yaitu Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat dan data *time series* yaitu data tahun 2010-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, sedangkan Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Secara bersama-sama, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: *Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Ketua



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

ABSTRACT

The Effect of Special Allocation Fund and Special Autonomy Grants on Poverty Reduction in the Provinces of Aceh, Papua and West Papua in 2010-2020

By:

Nur Anisa; Feny Marissa

This study aims to determine the effect of Special Allocation Fund and Special Autonomy Grants on poverty reduction. The data used in this study is data consisting of cross sectional data, the Provinces of Aceh, Papua and West Papua and time series for 2010-2020. The method used in this study is panel data regression analysis method using the Fixed Effect Model. The result showed that the Special Allocation Fund had a negative and insignificant effect on poverty reduction, while the Special Autonomy Grants had a negative and significant effect on poverty reduction. Taken together, the Special Allocation Fund and Special Autonomy Grants have an effect on poverty reduction.

Keyword: *Special Allocation Fund, Special Autonomy Grants, Poverty*

Approved by,

Head of Development Economics Program

Chairwoman



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nur Anisa

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Alamat Rumah : Jalan Letnan Simanjuntak RT.20 RW.08,
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan
Kemuning,
Palembang 30126

Alamat Email : 30.nuranisa@gmail.com

Nomor Handphone : 081334370592



PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SD Negeri 181 Palembang

2012-2015 : MTs Negeri 1 Palembang

2015-2018 : SMA Negeri 3 Palembang

2018-2023 : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Akademis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	12
2.1 Landasan Teori dan Konseptual	12
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal	12
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Menurut Adolf Wagner	13
2.1.3 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	16
2.1.4 Konsep Dana Alokasi Khusus	18
2.1.5 Konsep Dana Otonomi Khusus	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	24
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Teknik Analisis.....	27
3.4.1 Model Estimasi Data Panel.....	28
3.4.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	29
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	30
3.4.4 Uji Hipotesis	31
3.4.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	33
3.5 Definisi Operasional Variabel	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh.....	35
4.1.2 Gambaran Umum Provinsi Papua.....	41
4.1.3 Gambaran Umum Provinsi Papua Barat	45
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	49
4.2.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	50
4.2.3 Analisis Regresi Data Panel.....	52
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	55
4.2.5 Uji Hipotesis	56
4.2.6 Koefisien Determinasi	58
4.3 Pembahasan	58
4.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan	58
4.3.2 Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	49
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	51
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model	52
Tabel 4. 5 Hasil Intersep di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4. 9 Hasil Uji t.....	57
Tabel 4.10 Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020 (dalam Juta Rupiah)	59
Tabel 4.11 Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020 (dalam Juta Rupiah).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020	6
Gambar 1. 2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020.....	8
Gambar 1. 3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020.....	9
Gambar 2. 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	15
Gambar 2. 2 Lingkaran Setan Kemiskinan menurut Nurske	18
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4. 1 Persentase Penduduk Miskin Aceh Tahun 2010-2020.....	36
Gambar 4. 2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Aceh Tahun 2010-2020.....	39
Gambar 4. 3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2010-2020	40
Gambar 4. 4 Persentase Penduduk Miskin Papua Tahun 2010-2020	42
Gambar 4. 5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Papua Tahun 2010-2020.....	43
Gambar 4. 6 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2010-2020	44
Gambar 4. 7 Persentase Penduduk Miskin Papua Barat Tahun 2010-2020.....	46
Gambar 4. 8 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Papua Barat.....	47
Gambar 4. 9 Perkembangan Dana Otonomi Khusus Papua Barat	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	73
Lampiran 2 Data Penelitian Transformasi LN	75
Lampiran 3 Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	76
Lampiran 4 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	76
Lampiran 5 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model	77
Lampiran 6 Hasil Uji Chow	78
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman.....	79
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	80
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan terhadap daerah masing-masing. Artinya, pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya dan potensi daerah demi kepentingan daerah itu sendiri (HSB & Julianthy, 2019).

Pemberlakuan otonomi daerah menjadikan berbagai daerah dan wilayah di Indonesia melakukan pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat merencanakan, merumuskan, mengelola dan melaksanakan sendiri tugas dan kewenangan daerah masing-masing (Siregar & Ramadhan, 2020). Pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang memiliki pandangan bahwa pemerintah daerah merupakan suatu badan pemerintahan yang posisinya lebih erat dan juga lebih dekat dengan posisi masyarakat daerah tersebut, hal tersebut yang menjadikan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi, kebutuhan, prioritas serta potensi pada daerah tersebut sehingga dapat tercapai pembangunan yang lebih baik (Lisna *et al.*, 2013)

Menurut Asshiddiqie (2012), otonomi daerah atau desentralisasi dibedakan menjadi tiga definisi. Pertama, desentralisasi diartikan sebagai dekosentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan. Kedua, diartikan sebagai delegasi yang berisi penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dari

pemerintah pusat. Ketiga, desentralisasi yang dimaknai sebagai devolusi atau penyerahan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Desentralisasi merupakan faktor yang penting dari adanya pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh desentralisasi yang diwujudkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah telah menjadikan pemerintah dapat mengatur daerah sesuai dengan kekayaan budaya dan adat istiadat daerah setempat (Sistiana & Makmur, 2014). Otonomi daerah ditujukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kondisi perekonomian yang baik, meningkatkan potensi daerah dalam segi keuangan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat (Christia & Ispriyarso, 2019).

Menurut Haughton dan Khandker (2012), tolak ukur keberhasilan dari pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dalam seberapa besar kesejahteraan masyarakatnya. Secara ekonomi, kesejahteraan berarti seseorang yang menggunakan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan yang sesuai dan layak sehingga dapat menjalankan kehidupan dan fungsinya dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Mahaeni *et al.* (2011) juga menyatakan bahwa salah satu indikator yang tepat dan valid untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat kondisi kemiskinan penduduknya.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang diakibatkan dari ketidaktepatan pembangunan ekonomi suatu negara (Haughton & Khandker, 2012). Selain itu, *World Bank* (2015) juga mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, berupa layanan kesehatan dan pendidikan yang baik, makanan dan minuman serta tempat tinggal yang layak.

Sifat kemiskinan yang multidimensional telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan penduduk. Misalnya, ketimpangan pendapatan yang diterima, adanya peluang untuk menjadi miskin di generasi selanjutnya serta sulit bagi penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, keberagaman kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta wilayah yang luas telah menjadikan kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan sulit (Siregar & Ramadhan, 2020). Mengurangi tingkat kemiskinan harus dilakukan dengan cara menyatukan berbagai dimensi lainnya sehingga membuat permasalahan kemiskinan semakin mudah untuk di atasi (Paseki *et al.*, 2014).

Dimensi yang sering berkaitan dengan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga belum tercapainya kehidupan yang sejahtera, tingkat kesehatan yang belum memadai sehingga angka harapan hidup rendah, bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan meningkatnya jumlah pengangguran sebagai akibat dari berkurangnya lapangan kerja (Nurhidayah & Hendikawati, 2018). Sebagai implikasi, pemerintah memiliki peran dalam mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan dalam bidang keuangan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah (Oduola, 2017). Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut, yaitu dana transfer (Saraswati & Arka, 2016). Dalam penelitian ini, dana transfer yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (DOK).

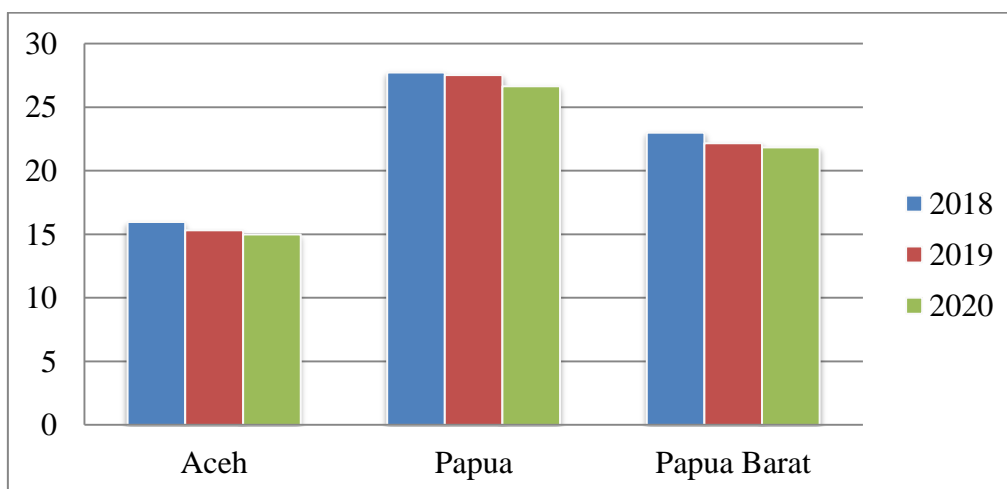
Keuangan daerah didukung oleh pemerintah pusat dengan memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan yang diberikan guna mendanai kegiatan khusus suatu daerah yang sesuai dengan tujuan nasional (*Specific Grants*), yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Balqis & Suriani, 2021). Apabila penerimaan Dana Alokasi Khusus tinggi, maka kesempatan pemerintah dalam mencapai target mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan semakin besar (Gumelar & Khairina, 2021). Daerah harus menyiapkan dana penyesuaian minimal 10 persen dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan hal tersebut harus tercantum dalam APBD daerah tersebut untuk kegiatan fisik (Mala & Kurnia, 2017).

Selain menggunakan transfer dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus, pengurangan kemiskinan juga dapat ditinjau dari pengalokasian transfer Dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diberikan secara khusus kepada daerah-daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris, yaitu kewenangan khusus pada wilayah-wilayah tertentu suatu negara, yang digunakan untuk menuntaskan permasalahan antara pusat dan daerah (Kadafi & Murtala, 2020). Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus digunakan untuk membiayai pembuatan sarana dan prasarana bagi publik, menyejahterakan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan sosial serta mengurangi kemiskinan (Enami *et al.*, 2019; Hartati *et al.*, 2016). Hal serupa juga dinyatakan oleh Budiratna dan Qibthiyyah (2020), yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah khusus yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian konflik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik. Hal tersebut

diharapkan mampu untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan.

Pemberian Dana Otonomi Khusus hanya diberikan kepada Aceh, Papua dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan provinsi-provinsi tersebut dikategorikan sebagai desentralisasi asimetris, yaitu suatu kewenangan khusus yang diberikan kepada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara guna menuntaskan berbagai permasalahan hubungan pusat dan daerah (Kadafi & Murtala, 2020). Selain itu, kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masih tinggi dan berada diatas rata-rata nasional (Agustina *et al.*, 2019; Budiratna & Qibthiyah, 2020).

Bappenas (2018) telah membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian wilayah yaitu, Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan provinsi-provinsi yang masuk dalam wilayah KTI dengan kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Adapun Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada dalam wilayah KBI yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi (Adnan, 2021). Adapun persentase kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat dapat di lihat pada Gambar 1.1:



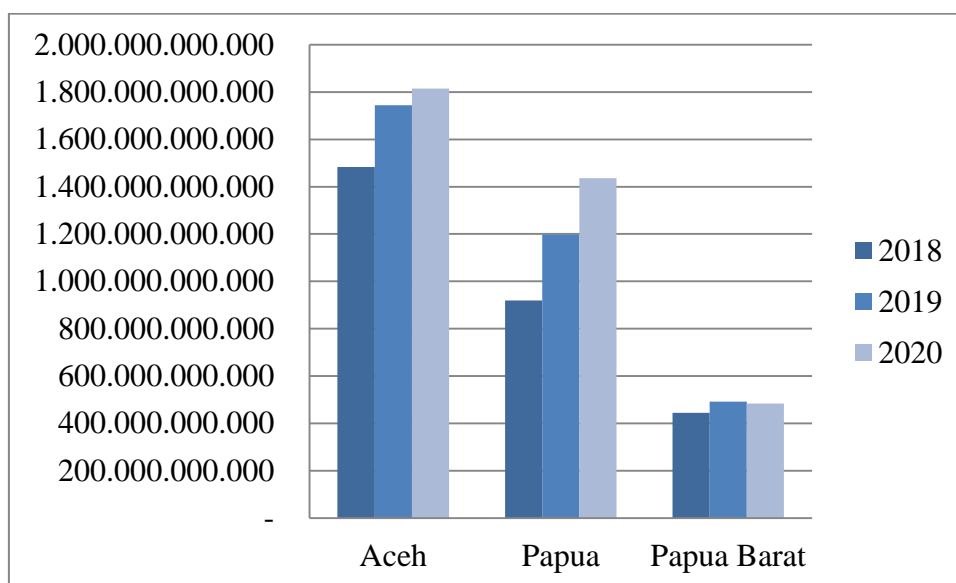
Sumber : BPS, diolah

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 14,99 persen atau 814 ribu jiwa, nilai ini berkurang 2,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh strategi Pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan dengan berbagai cara. Misalnya, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), bantuan rumah layak huni, menaikkan pendapatan masyarakat dan bantuan lainnya. Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia sebesar 26,64 persen atau 911 ribu jiwa pada tahun 2020 atau turun sebesar 3,23 persen dibanding tahun 2019. Adapun Provinsi Papua Barat memiliki kecenderungan menurun pada persentase penduduk miskin sebesar 21,84 persen atau 208 ribu jiwa pada tahun 2020 atau turun sebesar 1,48 persen. Penurunan-penurunan tersebut dikarenakan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan program-program untuk mengurangi kemiskinan di daerah masing-masing. Misalnya, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat Papua dan Papua Barat secara tunai maupun non tunai berupa program sembako dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) serta program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua) yang dikhususkan untuk kaum perempuan di Papua. Meskipun mengalami penurunan, kemiskinan di provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional, yaitu 15 persen.

Berdasarkan kondisi kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1, maka diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah berupa bantuan dana transfer yang disebut dengan Dana Alokasi Khusus. Tujuan Dana

Alokasi Khusus adalah untuk membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus di daerah otonom yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana daerah guna mendorong percepatan pembangunan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, semakin tinggi Dana Alokasi Khusus, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan dapat mengurangi kemiskinan (Fitriyanti & Handayani, 2020). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar & Khairina (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Adapun perkembangan Dana Alokasi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2.



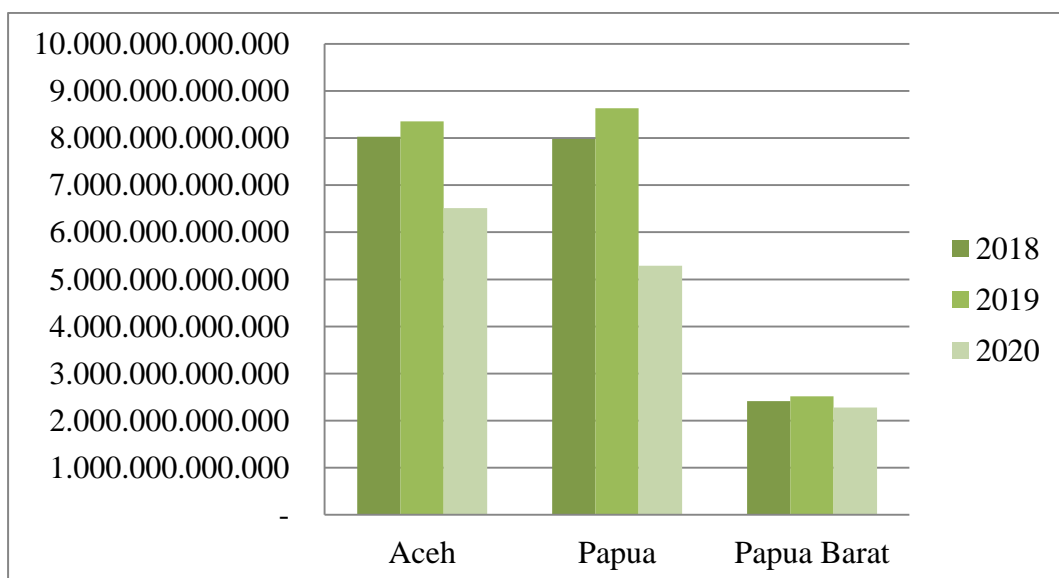
Sumber : BPS, diolah

Gambar 1.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan Dana Alokasi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Provinsi Aceh mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen, Papua mengalami kenaikan

sebesar 19,7 persen dan Papua Barat mengalami penurunan sebesar 1,6 persen daripada tahun sebelumnya. Penurunan nilai tersebut terjadi seiring adanya penyesuaian dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.

Selain menggunakan Dana Alokasi Khusus, pengurangan kemiskinan juga dapat ditinjau dari dana transfer khusus, yaitu Dana Otonomi Khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Aceh, Papua dan Papua Barat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan ekonomi dalam rangka kesetaraan dengan provinsi lain di Indonesia (Fardan, 2019). Perkembangan Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat ditunjukkan oleh Gambar 1.3.



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 1.3 Perkembangan Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan pada tahun 2019. Aceh

mengalami kenaikan sebesar 4,1 persen, Papua mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen dan Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 4 persen. Namun pada tahun 2020, dana otonomi khusus mengalami penurunan di semua daerah khusus. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan terjadinya penghematan anggaran. Alokasi dana otonomi khusus diutamakan untuk keperluan belanja bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa, meskipun Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus pada setiap provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun, hal tersebut nyatanya tidak menjadikan kemiskinan yang terjadi di Aceh, Papua dan Papua Barat mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi kemiskinan pada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020.
2. Mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh, Papua dan Papua Barat tahun 2010-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para akademisi, baik mahasiswa ataupun dosen yang digunakan untuk memahami permasalahan pengurangan kemiskinan.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengurangan kemiskinan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dalam pengembangan teori ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada peneliti selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang ada untuk digunakan sebagai pendukung analisis pada penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah daerah mengenai pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam pengurangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2021). Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2019. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 11.
- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Anggraeny, S. (2016). Analysis Of The Determinants Of Poverty In The Lampung Provinces. *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Anwar, M. L., Palar, S. W., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 218–232.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pres.
- Balqis, R., & Suriani. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Call For Paper Conference on Economic and Business Innovation*, 35, 1–12.
- Bappenas. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi* (V. Yulaswati (ed.)). Sumadi, Pungky.
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 402–414.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Enami, A., Lustig, N., & Taqdiri, A. (2019). Fiscal policy, Inequality, and Poverty in Iran: Assessing the Impact and Effectiveness of Taxes and Transfers. *Middle East Development Journal*, 11(1), 49–74. <https://doi.org/10.1080/17938120.2019.1583510>
- Fardan, M. F. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendidikan, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode Tahun 2011-2017). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah*.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Diponegoro*, 9, 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>

- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Hartati, C. S., Abdullah, S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 12–23.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Equality)*. Salemba Empat.
- HSB, A. M., & Julianthy, E. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 1–8. <https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97>
- Kadafi, M., & Murtala. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3, 23–31. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Kemenkeu. (2021). *Dukungan Pendanaan Kekhususan/Keistimewaan*. KPPN Kotabumi.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta:Erlangga.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.433>
- Mahaeni, A., Sudibia, I. K., Wirathi, I., Rustariyuni, S. D., Putu, N., & Dewi, M. (2011). Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, X(1), 8–18.
- Mala, F., & Kurnia. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(10), 3–5.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mantsani, M., Afrah, D., Rumodar, L., & Syukriah, K. (2019). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistic 2019*, 2019(1), 466–477.
- Mardani, R. (2021). Cara Memilih Model yang Tepat Pada Regresi Data Panel Eviews. *Mjurnal.Com*.
- Nufus, H., & Andra Asmara, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai

- Pemoderasi Pada Kab/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.
- Nurhidayah, T., & Hendikawati, P. (2018). Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Sciences*, 41(1), 1–5. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM/article/view/15813>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Journal Tax* No 46.
- Odusola, A. (2017). Fiscal Space , Poverty and Inequality in Africa. *African Development Review*, 29, 1–14.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Paseki, M. G., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 30–42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/5460>
- Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik (Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ramazan, S., & Safrida. (2022). Analisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2).
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 12–25.
- Ritonga. (2010). *Teori Kemiskinan*. Bandung : Rafika Aditama.
- Saraswati, I. G. A. A. P., & Arka, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(4), 1292–1316. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/24261/16081>
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 2409–2438.
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Publik*, 11(2), 1–

13.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnispublik/article/view/793>
- Sistiana, M., & Makmur, M. H. (2014). Derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten/kota. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(4), 277–286.
<https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/2216>
- Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *Kolegial*, 7(2), 150–166.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Intrans Publishing.
- Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik*. RajaGrafindo Persada.
- Widianto, A., Sedy, U., & Langgeng Nurmansyah, A. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, Vol. 5(No. 2), 170–176.
- Yulianto, T. (2022). *Memahami Kembali strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.